BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dalam era globalisasi karena diperlukan dan dimanfaatkan dalam segala bidang. Salah satu bidang yang terkena sentuhan teknologi informasi adalah pelayanan pemerintah kepada publik, dimana di era globalisasi ini rata-rata pelaksanaan pelayanan publik sudah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi (*e-Government*), sehingga proses pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta terciptanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Keberadaan internet di era globalisasi saat ini merupakan satu diantara sarana yang tidak akan lepas dari kehidupan manusia. Saat ini, teknologi internet sudah sedemikian maju dan terbukti bisa menembus dimensi jarak dan waktu. Internet memiliki kemampuan luar biasa dalam fungsinya sebagai sarana komunikasi publik dan sosial, dimana saat ini tidak perlu hanya mengandalkan telepon untuk sarana komunikasi, namun dengan kemajuan teknologi berbasis internet saat ini sarana komunikasi antar personal dapat diwujudkan dalam bentuk lain berbasis internet, misalnya dalam bentuk *chating*, dimana aplikasi-aplikasi *chating* ini sudah banyak terdapat didalam *handphone-handphone* canggih (*smartphone*) saat ini.

Perkembangan teknologi internet satu diantaranya adalah teknik digital, dimana sudah bisa mengakomodir semua kebutuhan manusia dibidang audio visual. Untuk menyaksikan tayangan video misalnya, orang tak perlu lagi memiliki televisi ataupun peralatan elektronik lainnya. Cukup dengan menekan beberapa tuts pada *keyboard* komputer personal (*PC*), setiap orang bisa dengan cepat, mudah dan praktis memenuhi keinginannya untuk menyaksikan tayangan apapun yang diinginkannya. Bahkan saat ini *handphone* sekalipun fasilitasnya sudah bisa untuk melihat video melalui internet.

Seiring dengan perkembangannya, *handphone* ini berkembang sangat pesat mengikuti perkembangan teknologi, dimulai dengan diciptakannya *smartphone* seperti *Blackberry, Android, Windows Phone,* dimana fitur-fitur yang disediakannya sedikit banyak sudah mengadopsi *Personal Computer,* sehingga untuk menikmati fitur-fitur di *PC* saat ini tidak perlu menunggu untuk berada dirumah, namun dimanapun dan kapanpun fitur-fitur tersebut sebagian besar sudah dapat dirasakan di *smartphone,* seperti aplikasi *Ms.Office, browser, games, chating, editing foto,* dll.

Teknologi berbasis internet ini dapat menjadi jembatan mencerdaskan masyarakat jika diarahkan kepada jalur yang tepat, karena melalui internet masyarakat dapat memperoleh segala informasi dalam kehidupan, contohnya saja, hanya dengan menggunakan *browser "www.google.com"* masyarakat dapat melihat dan mengetahui informasi dari segala penjuru dunia sehingga informasi tidak terpaku didapatkan melalui televisi atapupun radio saja, namun sudah didapatkan secara *online*.

Perubahan yang dialami masyarakat dunia saat ini yaitu mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat, potensi pemanfaatannya secara luas, dan ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang *digital divide*, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Oleh karena itu penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi.

Pada tahun 2003, Presiden Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Kemunculan Inpres ini tidak saja diartikan sebagai tindak lanjut Inpres no 6 tahun 2001 tetapi juga merupakan cetusan komitmen untuk menerapkan sebuah konsep tentang pemanfaatan teknologi informasi yang telah dipraktekan di negara-negara maju yang telah melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, yang diistilahkan sebagai *Electronic Government (e-Government).*

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat menyediakan ruang internet publik sebagai sarana internet gratis bagi masyarakat Jawa Barat sebagai tujuan memujudkan masyarakat informasi. Hal ini merupakan satu diantara realisasi Inpres No.3 Tahun 2003 dimana proses kebijakan pelayanan publik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi khususnya internet.

Ruang internet publik ini menjadi fasilitas pendukung dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas Jawa Barat untuk bisa lebih mengenal penggunaan internet, karena dengan fasilitas dan sarana yang disediakan diruang internet publik tersebut seperti perpustakaan, komputer dengan jaringan internet, dan penggunaannya secara gratis, dapat menjadi bagian dari tujuan mewujudkan masyarakat informasi.

Pelaksanaan ruang internet publik ini dalam kenyataannya banyak yang belum mengetahui keberadaannya, sehingga dapat dikatakan keberadaanya belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Barat. Dilain hal proses penggunaan internet di era globalisasi saat ini yang sangat mudah dan murah digunakan, karena internet dapat diakses melalui *handphone*, dan lebih lanjut sekarang ini sudah banyak *provider* telekomunikasi menyediakan benda meyerupai *flashdisk* yang dapat digunakan sebagai fasilitas langganan internet atau yang lebih populer disebut dengan modem, yang mudah dan murah digunakan sehingga dapat dibawa kemanapun dan tidak perlu repot lagi menggunakan jasa warnet. Sehingga hal tersebut menjadi pembahasanan yang menarik peneliti apakah kebijakan ruang internet publik tersebut masih layak atau tidak.

Tujuan mewujudkan masyarakat yang cerdas, salah satunya tidak gagap terhadap perkembangan teknologi, dapat tercapai jika dua elemen yang terkait dalam kebijakan tersebut dapat bekerjasama. Pemerintah selaku penyelenggara kebijakan bertanggungjawab mengukur dan merumuskan tujuan secara jelas, sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan secara sinergi antara pemerintah

dengan masyarakat. Dalam internet publik masyarakat harus mendukung sepenuhnya jika memang kebijakan tersebut memang benar-benar layak untuk dijalankan, sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tercapainya tujuan inipun dapat dilihat dari partisipasi masyarakat terhadap ruang internet publik tersebut. Berikut penulis sajikan hasil observasi lapangan dengan melihat buku absensi pengunjung bulan mei 2013.

Tabel 1.1
Data Pengunjung Ruang Internet Publik Bulan Mei Tahun 2013

No	Hari/Tanggal	Instansi	Keterangan
1	Rabu, 8 Mei 2013	Unikom	Searching
2	Selasa, 16 Mei 2013	PT. DAYACITRA	Upload LPSE
3	Rabu, 22 Mei 2013	Konsultan	Upload

(Sumber: buku tamu pengunjung ruang internet publik tahun 2013)

Buku tamu tersebut menjadikan gambaran bahwa minimnya pengunjung ruang internet publik tersebut dan dapat pula dikatakan bahwa buku tamu yang ada diruang internet publik belum tertata rapih sehingga antara pengunjung yang memiliki kepentingan memakai internet publik dan memiliki kepentingan lain seperti keperluan praktek kerja lapangan, Penelitian dan sebagainya masih belum jelas. Karena bisa saja pengunjung yang bermaksud melakukan penelitian ataupun praktek kerja lapangan menggunakan ruang internet publik pula, namun karena buku tamunya masih dicampur aduk, sehingga tidak terlihat pengunjung ruang internet publik tersebut.

Sumber daya yang dimiliki dalam suatu kebijakan khususnya internet publik, merupakan salah satu hal penting agar ruang internet publik ini dapat berjalan sesuai tujuannya, karena ketika sumber daya tersebut bekerja secara

profesional maka bukanlah asa semata ruang internet publik ini dapat berjalan secara optimal, apalagi perkembangan teknologi komunikasi khususnya internet membutuhkan aparatur/orang-orang yang memang profesional dalam menjalankannya sehingga dapat memberikan penyuluhan dan pendidikan internet sehat kepada masyarakat luas.

Karakteristik dari pada aparatur pelaksana ruang internet publik ini menjadi bagian penting karena haruslah kuat dan berpendirian teguh, apalagi dengan kondisi masyarakat yang semakin cerdas dan dinamis, pemerintah haruslah mempunyai beragam cara agar tujuan kebijakan tersebut dijalankan secara optimal, sehingga kebijakan tersebut dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan baik yang notabene berpendidikan, maupun masyarakat yang tidak berpendidikan.

Sikap dari para pelaksana kebijakan ruang internet publik ini pun tidak lepas dari perhatian. Karena suatu kebijakan akan berjalan sinergi jika pemahaman daripada aparatur-aparatur pelaksana tersebut sudah sejalan dengan kebijakan tersebut, sehingga tidak adanya unsur politik, kepentingan pribadi dan hal lainnya yang meliputi kebijakan ruang internet publik tersebut, namun memang didasarkan untuk melayani rakyat sebagai pihak yang akan menggunakan kebijakan tersebut. karena kondisi masyarakat saat ini yang semakin cerdas terkadang menjadikan *feedback* manakala kebijakan tersebut tidak sejalan sesuai keinginan mereka, tidak segan-segan untuk demo dan mengkritik kebijakan tersebut.

Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dalam ruang internet publik ini pun merupakan salah satu aspek penting dalam mensukseskan kebijakan tersebut, tanpa komunikasi dan koordinasi yang baik maka kebijakan tersebut akan berjalan tidak seimbang dan akan jauh dari tujuan. Di era digital sekarang ini makna komunikasi diartikan beragam, salah satunya digambarkan secara visual, kebijakan-kebijakan yang dijalankan harus terlebih dahulu di informasikan kepada masyarakat luas sehingga tersebar kepada semua pihak, memanfaatkan teknologi internet, kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan melalui *website* dinasnya masing-masing ataupun dapat ditunjukan dengan menggunakan media komunikasi yang lain seperti dengan sebuah spanduk, brosur, dan lain-lain. Fakta dilapangan, Sampai sejauh ini komunikasi yang telah dilakukan Diskominfo dalam ruang internet publik ini adalah penjelasan melaui *website* http://diskominfo.jabarprov.go.id/layanan/ dan juga pembuatan brosur "GAPURA WARTA" tahun 2013 yang didalamnya satu diantaranya menjelasakan mengenai ruang internet publik sebagi pusat layanan informasi menggunakan layanan internet.

Hal yang selanjutnya harus diperhatikan dalam suatu proses implementasi kebijakan ruang internet publik adalah lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Lingkungan ekonomi dijelaskan dengan bagaimana kebijakan ruang internet publik ini dapat dirasakan oleh masyarakat dengan biaya yang murah bahkan gratis, sehingga masyarakat tidak segan dan ragu untuk menikmati sarana dan fasilitas yang ada yang disediakan pemerintah sebagai bagian dari kebijakannya.

Lingkungan sosial ini menjadi bagian dimana masyarakat merupakan elemen yang mempunyai keterkaitan, dimana dapat saling membantu dan mempengaruhi satu sama lain. Suatu kebijakan kadang kala haruslah melihat lingkungan sosial yang ada sebagai suatu parameter kebijakan tersebut akan dijalankan. Karena lingkungan sosial yang tidak kondusif dapat menjadi hambatan kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Politik menjadi bahasa yang tidak asing kita dengar saat ini, karena seringnya dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan kita tidak terlepas dari proses suatu kebijakan, suatu kebijakan adakalanya dibentuk karena berbagai unsur politik didalamnya, sehingga kebijakan tersebut menjadi lain tujuannya ketika ada unsur kekuasaan, kepentingan didalamnya. Namun politik dalam suatu kebijakanpun dapat menjadi bagian yang manis manakala diarahkan kepada hal yang baik dimana tujuan kepentingan secara nasional dan melayani masyarakat menjadi tumpuannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengambil judul **"Implementasi Kebijakan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* (Suatu Studi Pada Ruang Internet Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, maka rumusan masalah peneliti adalah mengenai

Bagaimana Implementasi Kebijakan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* (Suatu Studi Pada Ruang Internet Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat)?.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan ruang internet publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Sedangkan tujuanya adalah :

1. Untuk mengetahui ukuran dan tujuan kebijakan (*policy standards and objectives*) dalam ruang internet publik di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui sumber daya (*resources*) dalam kebijakan ruang internet publik di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana (*interorganizational communication and enforcement activities*) dalam ruang kebijakan internet publik di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui karakteristik agen pelaksana (*The Characteristics of the implementing Agencies*) dalam kebijakan ruang internet publik di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui disposisi (*The Disposition of Implementors*) dalam ruang kebijakan internet publik di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

6. Untuk mengetahui lingkungan ekonomi, sosial dan politik (*Economics, Social, and Political Conditions*) dalam kebijakan ruang internet publik di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sesuatu yang dikerjakan seharusnya mempunyai manfaat baik untuk diri sendiri dan umumnya untuk orang lain. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Bagi Kepentingan Peneliti

   Penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai bagaimana implementasi kebijakan ruang internet publik yang merupakan fasilitas internet gratis bagi masyarakat berbasis pemanfaatan perkembangan teknologi informasi yang didasarkan pada Inpres No.3 Tahun 2003 yang ditinjau dari teori yang peneliti gunakan, studi pustaka, serta kondisi nyata di lapangan.

2. Secara Teoritis

   Penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori implementasi kebijakan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya mengenai impelementasi kebijakan.

3. Secara Praktis

   Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi Diskominfo Provinsi Jawa barat dalam implementasi kebijakan ruang internet publik.